



KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

# Laporan Tahunan



---

**Layanan Informasi Publik  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian  
2016**



# **LAPORAN TAHUNAN**

## **PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN (PPMKP)  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2016

#### I. Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

##### a. Kebijakan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan Negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) semakin menguatkan pengaturan hak dan kewajiban terkait informasi publik. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara yang sederhana.

Dalam Undang-Undang ini disebutkan Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggaraan negara lainnya yang mendapat dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non-pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum,

seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Sebagai implementasi UU No 14 tahun 2008 ini, Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pertanian yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 dengan menambahkan unsur layanan informasi publik secara daring dalam aturannya. Dalam pelaksanaannya di tingkat eselon satu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mengeluarkan Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor: 5/Kpts/OT.140/J/1/14 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, di mana PPMKP termasuk di dalamnya. Dengan terbentuknya PPID pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

b. Sarana dan Prasarana

1. Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik.

Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap pemohon informasi publik yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan ruang desk informasi publik yang menyatu dengan front office PPMKP di Komplek Candra.

Luas ruangan desk informasi public berukuran 20 meter persegi, yang terdiri dari 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu. Ruangan dilengkapi dengan 1 Telepon/Fax, 1 unit TV Plasma serta instrument untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.



Ruang Layanan Informasi Publik

## 2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh PPMKP, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat <http://ppmkp.bpsdmp.pertanian.go.id>.

Selain informasi publik yang sifatnya berkala dan serta merta, dalam website juga sudah menyediakan tautan ke portal informasi publik PPMKP ([http:// ppmkp.ppid.pertanian.go.id](http://ppmkp.ppid.pertanian.go.id)) yang menyediakan aplikasi SILAYAN (Sistem Informasi Layanan Informasi Publik), SIDADO (Sistem Informasi Data dan Dokumentasi) dan SIBERAT (Sistem Informasi Keberatan atas Layanan Informasi Publik) untuk memberikan layanan informasi publik secara daring (online) yang mengacu pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Tampilan antarmuka Portal PPIID

## 3. Kondisi Sumber Daya Manusia Pengelola

Pelayanan informasi publik di PPIID PPMKP, dilakukan oleh tim layanan informasi publik yang bertugas di desk layanan informasi publik yang berada di Komplek Candra, yaitu petugas front office yang bertugas di front desk dan 1 orang bertugas di back office yaitu Pranata Humas yang didukung oleh 1 orang petugas penyedia data dan dokumentasi yang

dilaksanakan oleh Arsiparis. Petugas layanan tersebut bertugas setiap hari kerja secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

#### 4. Anggaran dan Laporan Penggunaannya

Anggaran pelayanan informasi sejak tahun Anggaran 2016 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran DIPA PPMKP.

## II. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

### a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dan pengolahan dokumen dilakukan secara bertahap mengikuti pola dan prinsip pengarsipan. Dokumen yang dibuat oleh pembuat dokumen, dikumpulkan dan kemudian diklasifikasikan berdasarkan prinsip dan klasifikasi kearsipan dengan mengikuti jadwal retensi arsip yang sudah ditentukan.

### b. Daftar Informasi Publik Yang di Kuasai

Pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPMKP masuk dalam kelompok pelayanan jasa diklat, yakni menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tentang Diklat Manajemen, Kepemimpinan, Multimedia dan Pelatihan Fungsional Non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian serta pelayanan peminjaman/penggunaan tempat fasilitas. Selain itu dokumen-dokumen administrasi pendukung menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen yang termasuk dalam Daftar Informasi Publik yang dikuasai.

Daftar Informasi Publik yang berada dalam penguasaan PPID Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian hasil pembaharuan hingga 30 November 2016 kami sertakan dalam lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan ini.

### c. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik mengacu pada UU No. 14 tahun 2008 dan Permentan Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 masih mengalami kendala, diantaranya:

- Belum tersedianya sarana prasarana sesuai dengan standar layanan publik mengacu pada Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PPID Kementerian Pertanian, salah satunya belum tersedianya komputer, scanner, printer dan jaringan internet yang khusus digunakan untuk layanan informasi publik.
- Masih kurangnya sosialisasi tentang mekanisme layanan informasi publik baik kepada kalangan pemohon informasi publik maupun kepada kalangan internal karyawan PPMKP, sehingga terkadang pemohon informasi publik langsung meminta informasi tanpa melalui PPID.
- Data dan informasi yang tersebar dan dikuasai oleh masing-masing bidang dan seksi masih belum sepenuhnya bisa diakses.

### III. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

#### a. Pelayanan Informasi Publik

PPID PPMKP memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 08.30 s/d 16.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 7 jam dan seminggu 35 jam. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi PPID PPMKP.

Dalam praktiknya, hingga akhir tahun 2016, sebagian besar permintaan informasi ke PPMKP tidak menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam tata cara permintaan informasi publik berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, melainkan langsung melalui alamat email dan akun media sosial PPMKP. Pemenuhan informasi yang sebagian besar berkaitan erat dengan tupoksi PPMKP, akhirnya dilakukan melalui email dan media sosial yang ada.

#### 1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jumlah Pemohon Informasi Publik pada PPID PPMKP Tahun 2016

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Dipenuhi	Ditolak	Dalam Proses	Waktu	Alasan Penolakan
1	Januari	-					
2	Pebruari	-					
3	Maret	3	3			3 hari	
4	April	4	4			< 5 hari	
5	Mei	2	2			1 hari	
6	Juni	-					
7	Juli	-					
8	Agustus	-					
9	September	2	2			2 hari	
10	Oktober	2	2			5 hari	
11	November	3	3			1 hari	
12	Desember	-					
	Jumlah	16	16	-	-	-	-

#### IV. Saran dan Kesimpulan

Sebagai lembaga publik yang terkena kewajiban untuk memberikan layanan informasi kepada publik berdasar ketentuan UU No 14 tahun 2008, PPMKP telah melaksanakan mekanisme layanan informasi publik sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016.

Layanan informasi publik yang diselenggarakan PPMKP meliputi layanan tatap muka melalui front desk layanan Informasi Publik yang terletak di Komplek Candra. Selain itu informasi publik bisa diakses melalui website [ppmkp.bppsdp.pertanian.go.id](http://ppmkp.bppsdp.pertanian.go.id). Layanan informasi juga tersedia melalui email [ppmkp@pertanian.go.id](mailto:ppmkp@pertanian.go.id) serta melalui media sosial yaitu Facebook di alamat <https://www.facebook.com/ppmkpofficial/>

#### V. Penutup

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID PPMKP Ciawi.

Bogor, 5 Januari 2017

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan  
Pertanian**



Ir. Dwi Poetranti Kientjokowati  
NIP. 19590717 198403 2 001

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN  
2016**

**1. INFORMASI BERKALA**

No	Judul Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bagian Pembuatan Informasi	Bentuk Arsip			Keterangan
				Cetak	Softcopy	Online	
	Profil PPMKP	2016	Bagian Umum	√	√	√	
	Leaflet Profil	2014	Bagian Umum	√			
	Informasi Keragaan Pegawai	2016	Bagian Umum	√	√	√	
	Informasi Tentang Diklat PIM III	2016	Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	√	√	√	
	Informasi Tentang Diklat PIM IV	2016	Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	√	√	√	
	Informasi Tentang Diklat Prajabatan Gol III	2016	Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	√	√	√	
	Informasi Tentang Diklat Prajabatan Gol I dan II	2016	Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	√	√	√	
	Informasi Tentang Diklat Prajabatan K1 dan K2	2016	Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	√	√	√	
	Informasi Tentang Diklat Manajemen	2015	Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	√	√	√	
	Informasi Tentang Diklat Multimedia Pertanian	2015	Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	√	√	√	
	Data Alumni Diklat PIM III tahun 2015	2016	Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	√	√	√	
	Data Alumni Diklat PIM III tahun 2016	2016	Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	√	√	√	
	Data Alumni Diklat PIM IV tahun 2015	2016	Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	√	√	√	
	Data Alumni Diklat PIM IV tahun 2016	2016	Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	√	√	√	



	Data Alumni Diklat Prajabatan Gol III tahun 2015	2016	Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	√	√	√
	Data Alumni Diklat Prajabatan Gol I dan II tahun 2016	2016	Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	√	√	√
	Data Alumni Diklat Prajabatan K1 dan K2 tahun 2015	2016	Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	√	√	√
	Daftar Judul Proyek Perubahan Diklat PIM III Angkatan 6 (2016)	2016	Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	√	√	√
	Daftar Judul Proyek Perubahan Diklat PIM III Angkatan 7 (2016)	2016	Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	√	√	√
	Daftar Judul Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan 7 (2016)	2016	Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	√	√	√
	Daftar Judul Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan 8 (2016)	2016	Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	√	√	√
	Daftar Judul Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan 9 (2016)	2016	Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	√	√	√
	Informasi Fasilitas Penunjang Diklat	2016	Bagian Umum	√	√	√
	Link Permohonan Informasi Publik	2016	Bagian Umum	√	√	√
	Prosedur Permohonan Informasi Publik	2015	Bagian Umum	√	√	√
	Prosedur Pengajuan Keberatan Atas Informasi Publik	2015	Bagian Umum	√	√	√
	LAKIP 2013	2014	Bidang Program dan Evaluasi	√	√	√
	LAKIP 2014	2015	Bidang Program dan Evaluasi	√	√	√
	IKM 2013	2014	Bidang Program dan Evaluasi	√	√	√
	IKM 2015	2016	Bidang Program dan Evaluasi	√	√	√
	Neraca Keuangan 2012	2015	Bagian Umum	√	√	√
	Neraca Keuangan 2013	2015	Bagian Umum	√	√	√
	Neraca Keuangan 2014	2015	Bagian Umum	√	√	√
	Laporan Triwulan I 2015	2015	Bidang Program dan Evaluasi	√	√	√

			Evalusi					
	Ringkasan Laporan Keuangan Tahun 2012	2015	Bagian Umum	√	√	√	√	√
	Ringkasan Laporan Keuangan Tahun 2013	2015	Bagian Umum	√	√	√	√	√
	Ringkasan Laporan Keuangan Tahun 2014	2015	Bagian Umum	√	√	√	√	√
	Rencana Strategis Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian 2015-2019	2016	Bidang Program dan Evaluasi	√	√	√	√	√

## 2. INFORMASI SETIAP SAAT

No	Judul Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bagian Pembuatan Informasi	Bentuk Arsip			Keterangan
				Cetak	Softcopy	Online	
1.	Surat Keputusan Nomor : 01/Kpts/KP.340/J.3.1/01/2016 Penataan Penempatan Pegawai PPMKP Ciawi	4 Januari 2016	Bagian Umum	√			
2.	Surat Keputusan Nomor : 02/KPA/KP.430/B.1/01/2016 SK tentang Honarium THL 2016	4 Januari 2016	Bagian Umum	√			
3.	Surat Keputusan Nomor : 03/KPA/KV.010/J3.1/01/2016 Penetapan pejabat pembuat komitmen PPMKP TA 2016	4 Januari 2016	Bagian Umum	√			
4.	Surat Keputusan Nomor : 04/Kpts/KU.010/J31/01/2016 Penetapan pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PP-SPM) PPMKP	4 Januari 2016	Bagian Umum	√			
5.	Surat Keputusan Nomor : 05/Kpts/DT.010/J31/DI/2016 Penataan penempatan Tenaga Harian Lepas PPMKP TA 2016	4 Januari 2016	Bagian Umum	√			
6.	Surat Keputusan Nomor : 06/Kpts/KP.430/J31/01/2016 Kendaraan dinas untuk kegiatan PPMKP TA 2016	4 Januari 2016	Bagian Umum	√			
7.	Surat Keputusan Nomor : 07/KPA/KP.340/J3.1/01/2016 Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PPMKP Ciawi	4 Januari 2016	Bagian Umum	√			
8.	Surat Keputusan Nomor : 08/Kpts/KU.100/J.3.1/01/2016 Besarnya Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai PPMKP	4 Januari 2016	Bagian Umum	√			
9.	Surat Keputusan Nomor : 09/KPA/KP.430/J.3.1/01/2016 Penunjukan Pengelolaan Sistem Akutansi Instansi (SAL), SABMIN dan Penyimpanan / Pengurusan Barang Milik	4 Januari 2016	Bagian Umum	√			

	Negara							
10.	Surat Keputusan Nomor : 10/KPA/KP.430/J.3.1/01/2016 Penunjukan Pelaksana Anggaran dan Besarnya Honorium PPMKP TA. 2016	4 Januari 2016	Bagian Umum	√				
11.	Surat Keputusan Nomor : 11/Kpts/OT.050/J.3.1/01/2016 Satuan Pelaksana Pengendalian Internal Tahun 2106	4 Januari 2016	Bagian Umum	√				
12.	Surat Keputusan Nomor : 12/Kpts/OT.050/J.3.1/01/2016 Pembentukan Unit Pengendalian Grafifikasi PPMKP Tahun 2016	4 Januari 2016	Bagian Umum	√				
13.	Surat Keputusan Nomor : 13/Kpts/KP.430/J.3.1/01/2016 Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu PPMKP TA. 2016	4 Januari 2016	Bagian Umum	√				
14.	Surat Keputusan Nomor : 14/Kpts/OT.050/J.3.1/01/2016 Pemberentukan Manajemen Pengelolaan RPC serta Penunjukan Penyiar dan Narasumber / Pakar Siaran Interaktif Tahun 2016	4 Januari 2016	Bagian Umum	√				
15.	Surat Keputusan Nomor : 14.1/Kpts/RC.110/J.3.1/01/2016 Penetapan Program dan Rencana Operasional Kegiatan	4 Januari 2016	Bagian Umum	√				
	Surat Keputusan Nomor : 15/Kpts/OT.210/J.3.1/01/2016 Kordinatorator Pejabat Fungsional Widwaiswara PPMKP Tahun 2016-2018	8 Januari 2016	Bagian Umum	√				
16.	Surat Keputusan Nomor : 15.1/KPA/SM.120/J.3.1/01/2016 Penunjukan penyelenggara Diklat kewidwaiswaraan Berjenjang Tingkat utama	11 Februari 2016	Bagian Umum	√				
	Surat Keputusan Nomor : 15.2/KPA/ SM.120/J.3.1/02/2016 Penunjukan penyelenggara diklat media cetak bagi penyuluh pert. Ang.I dan Ang.II	15 Februari 2016	Bagian Umum	√				
	Surat Keputusan Nomor : 15.3/KPA/ SM.120/J.3.1/02/2016 Penunjukan Penyelenggara Diklat Kewidwaiswaraan Berjenjang Tingkat Madya	15 Februari 2016	Bagian Umum	√				
	Surat Keputusan Nomor : 15.4/KPA/ SM.120/J.3.1/02/2016 Penataan Penempatan Tenaga Harian Lepas	4 Februari 2016	Bagian Umum	√				
	Surat Keputusan Nomor : 16/Kpts/KP.630/J.3.1/02/2016	18 Februari 2016	Bagian Umum	√				

	Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri dengan Hak Pensiun a.n. Dewi Ganevianti								
	Surat Keputusan Nomor : 16.1/Kpts/SM.140/J.3.1/02/2016 Tentang Penunjukan Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. III Ang. VI	22 Februari 2016	Bagian Umum	√					
	Surat Keputusan Nomor : 16.2/Kpts/SM.140/J.3.1/02/2016 Tentang Penunjukan Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. IV Ang. VII	22 Februari 2016	Bagian Umum	√					
	Surat Keputusan Nomor : 17/Kpts/KP.010/J.3.1/02/2015 Tim Penyusun Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja PPMKP	25 Februari 2016	Bagian Umum	√					
	Surat Keputusan Nomor : 18/KPA/ SM.100/J.3.1/02/2016 Penyelenggaraan Evaluasi Pasca Diklat pada pendidikan dan pelatihan prajabatan GOL.III dan Gol.II Kementan Th.2015	25 Februari 2016	Bagian Umum	√					
	Surat Keputusan Nomor : 19/KPA/SM.100/J.3.1/03/2016 Penyelenggaraan Diklat teknis pengelolaan arsip dinamis angk.I & II	7 Maret 2016	Bagian Umum	√					
	Surat Keputusan Nomor : 18.1/Kpts/OT.050/J.3.1/02/2016 Tim penyusun Renja, RKT, Lakip dan Laporan Tahunan PPMKP Ciawi Th. 2016	25 Februari 2016	Bagian Umum	√					
	Surat Keputusan Nomor : 18.2/Kpts/OT.050/J.3.1/02/2016 Tim penyusun instrumen IKD dan Evaluasi serta model rancangan evaluasi penyelenggaraan pelatihan PPMKP Th. 2016	25 Februari 2016	Bagian Umum	√					
	Surat Keputusan Nomor : 18.3/Kpts/OT.050/J.3.1/02/2016 Tim penyusun Akreditasi Lembaga dan Pelatihan , Modul, dan Juknis Pelatihan PPMKP Th. 2016	25 Februari 2016	Bagian Umum	√					
	Surat Keputusan Nomor : 18.4/Kpts/OT.050/J.3.1/02/2016 Tim penyusun Rencana strategis PPMKP Ciawi Th. 2015-2019	25 Februari 2016	Bagian Umum	√					
	Surat Keputusan Nomor : 18.5/Kpts/OT.050/J.3.1/02/2016	25 Februari 2016	Bagian Umum	√					

	Tim Pelaksana Kegiatan CF-SKR P4S dan Pembinaan P4S PPMKP						
	Surat Keputusan Nomor : 18.6/Kpts/OT.050/J.3.1/02/2016 Tim Penyusunan Program /Perencanaan Tahun 2017 PPMKP	25 Februari 2016	Bagian Umum	√			
	Surat Keputusan Nomor : 18.7/Kpts/OT.050/J.3.1/02/2016 Tim Monitoring dan Evaluasi GPPT / Upsus PPMKP	25 Februari 2016	Bagian Umum	√			
	Surat Keputusan Nomor : 18.8/Kpts/OT.050/J.3.1/03/2016 Tim Penyusunan Analis Kebutuhan Diklat PPMKP Ciawi Tahun 2016	4 Maret 2016	Bagian Umum	√			
	Surat Keputusan Nomor : 18.9/Kpts/KP.370/J.3.1/03/2016 SK Hukum Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	29 Maret 2016	Bagian Umum	√			
	Surat Keputusan Nomor : 18.10/Kpts/SM.140/J31/03/2016 Tentang Penunjukan Pembimbing Diklat PIM III Ang. VI	4 Maret 2016	Bagian Umum	√			
	Surat Keputusan Nomor : 18.11/Kpts/SM.140/J31/03/2016 Tentang Penunjukan Pembimbing Diklat PIM IV Ang. VII	7 Maret 2016	Bagian Umum	√			
	Surat Keputusan Nomor : 18.12/Kpts/SM.140/J31/03/2016 Tentang Penunjukan Penyelenggaraan Diklat PIM IV Ang. VIII	7 Maret 2016	Bagian Umum	√			
	Surat Keputusan Nomor : 19.1/KPA/SM.120/J31/03/2016 Diklat Calon Widyaiswara	21 Maret 216	Bagian Umum	√			
	Surat Keputusan Nomor : 20/KPA/SM.120/J.3.1/03/2016 Penyelenggaraan Diklat Calon Widyaiswara	22 Maret 2016	Bagian Umum	√			
	Surat Keputusan Nomor : 21/KPA/SM.120/J.3.1/03/2016 Penyelenggaraan Diklat Pemantapan Magang Jepang	22 Maret 2016	Bagian Umum	√			
	Surat Keputusan Nomor : 21.1/Kpts/SM.140/J.3.1/03/2016 Tentang Penunjukan Penguji Diklat PIM III Angkatan VI	28 Maret 2016	Bagian Umum	√			
	Surat Keputusan Nomor : 21.2/Kpts/SM.140/J.3.1/03/2016 Tentang Penunjukan Pembimbing Diklat PIM IV Angkatan VIII	21 Maret 2016	Bagian Umum	√			
	Surat Keputusan Nomor : 22/KPA/SM.120/J.3.1/04/2016 Diklat Karya Tulis Ilmiah Populer Bagi Penyuluh Angkatan I dan II	5 April 2016	Bagian Umum	√			



	Surat Keputusan Nomor : 22.1/KPA/SM.120/J.3.1/04/2016 Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Muda	5 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 22.2/KPA/SM.120/J.3.1/04/2016 Diklat Audio Visual Bagi Penyuluh Angkatan I dan II	5 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 22.3/KPA/SM.140/J.3.1/04/2016 Tentang Penunjukan Penguji Diklat PIM IV Ang. VII	4 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 23/Kpts/KP.210/J.3.1/04/2016 SK Kenaikan Pangkat PNS a.n. Dedih Zaenudin, S.Sos, MIM	7 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 24/Kpts/KP.210/J.3.1/04/2016 SK Kenaikan Pangkat PNS a.n. Sirojudin, S.Sos	7 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 25/Kpts/KP.210/J.3.1/04/2016 SK Kenaikan Pangkat PNS Nanang Djaenudin, S.Sos	7 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 26/Kpts/KP.210/J.3.1/04/2016 SK Kenaikan Pangkat PNS a.n. Eti Sulastri, S.Sos	7 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 27/Kpts/KP.210/J.3.1/04/2016 SK Kenaikan Pangkat PNS a.n. R. Ida Farida, S.Sos	7 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 28/Kpts/KP.210/J.3.1/04/2016 SK Kenaikan Pangkat PNS a.n. Nurdin	7 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 29/Kpts/KP.210/J.3.1/04/2016 SK Kenaikan Pangkat PNS a.n. Maman	7 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 30/Kpts/KP.210/J.3.1/04/2016 SK Kenaikan Pangkat PNS a.n. Suherman	7 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 31/Kpts/KP.210/J.3.1/04/2016 SK Kenaikan Pangkat PNS a.n. Saadiah	7 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 32/Kpts/KP.210/J.3.1/04/2016 SK Kenaikan Pangkat PNS a.n. Awa Jaenal Abidin	7 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 33/Kpts/KP.210/J.3.1/04/2016 SK Kenaikan Pangkat PNS a.n. Mad Yusuf	7 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 34/Kpts/KP.210/J.3.1/04/2016 SK Kenaikan Pangkat PNS a.n. Sukarta	7 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 35/Kpts/KP.210/J.3.1/04/2016 SK Kenaikan Pangkat PNS a.n. Suriyana	7 April 2016	Bagian Umum	√		

	Surat Keputusan Nomor : 36/Kpts/KP.210/J.3.1/04/2016 SK Kenaikan Pangkat PNS a.n. Ugan	7 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 37/Kpts/KP.210/J.3.1/04/2016 SK Kenaikan Pangkat PNS a.n. Jeje	7 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 38/Kpts/KP.210/J.3.1/04/2016 SK Kenaikan Pangkat PNS a.n. Oom Komariah	7 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 39/Kpts/KP.210/J.3.1/04/2016 SK Kenaikan Pangkat PNS a.n. Nizmah Jatisari Hidayah, SP, MIP	7 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 40/Kpts/KP.220/J.3.1/04/2016 SK Kenaikan Pangkat PNS a.n. Wiwik Yuniarti, SP, M.Si	7 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 41/Kpts/KP.210/J.3.1/04/2016 SK Kenaikan Pangkat PNS a.n. Atim, S.Sos	7 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 41.1/Kpts/SM.140/J.3.1/04/2016 Tentang Penunjukan Penyelenggaraan Diklat PIM III Ang. VII	18 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 41.2/Kpts/SM.140/J.3.1/04/2016 Tentang Penunjukan Penyelenggaraan Diklat PIM IV Ang. IX	18 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 41.3/KPA/SM.140/J.3.1/04/2016 Tentang Penunjukan Pengujian Diklat PIM IV Ang. VIII	25 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 41.4/KPA/SM.140/J.3.1/04/2016 Tentang Penunjukan Pengujian Diklat PIM IV Ang. IX	18 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 41.5/KPA/SM.140/J.3.1/04/2016 Tentang Penunjukan Pembimbing Diklat PIM IV Ang. IX	18 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 41.6/KPA/SM.140/J.3.1/04/2016 Tentang Penunjukan Pengujian Diklat PIM III Ang. VII	18 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 41.7/KPA/SM.140/J.3.1/04/2016 Tentang Penunjukan Pembimbing Diklat PIM III Ang. VII	18 April 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 42/KPA/SM.120/J.3.1/05/2016 Diklat Kewirausahaan Bagi Petani Muda	3 Mei 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 43/KPA/SM.120/J.3.1/05/2016 Diklat Audiovisual Bagi Penyuluh Ang. I dan II	3 Mei 2016	Bagian Umum	√		

	Surat Keputusan Nomor : 44/KPA/SM.120/J.3.1/05/2016 Diklat Bendahara Pengeluaran	3 Mei 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 45/KPA/SM.100/J.3.1/05/2016 Penyelenggaraan Magang Bagi Pengelola Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan (P4S) Tahun 2016	4 Mei 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 46/KPA/SM.100/J.3.1/05/2016 Diklat Pengelola BMN Bagi Petugas	13 Mei 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 47/Kpts/OT.050/J.3.1/05/2016 Susunan Organisasi Kepanitiaan Orasi Ilmiah Widyaiswara Ahli Utama Tahun 2016	20 Mei 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 48/KPA/SM.120/J.3.1/05/2016 Diklat Bantu Penyuluhan Bagi Penyuluh Ang. I dan II	20 Mei 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 49/KPA/SM.120/J.3.1/05/2016 Diklat Peningkatan Kapasitas Pendampingan bagi Penyuluh	20 Mei 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 50/KPA/SM.120/J.3.1/05/2016 Diklat Peningkatan Kapasitas bagi Penyuluh Pendampingan	23 Mei 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 51/KPA/SM.120/J.3.1/05/2016 Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Bagi Pimpinan BP3K Provinsi Sumatra Barat Ang. I dan II Tahun 2016	16 Mei 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 52/KPA/SM.110/J.3.1/05/2016 Penyelenggaraan Pelatihan Penulisan dan Pengelolaan Website Ang. I dan II TA. 2016	18 Mei 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 53/KPA/SM.100/J.3.1/05/2016 Penyelenggaraan Evaluasi Pasca Diklat Pada Diklat Metodologi Pengajaran Bagi Instruktur P4S Tahun 2015	10 Mei 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 54/Kpts/KP.130/J.3.1/06/2016 Pangkat Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. Winstone, S.Sos	13 Juni 2016	Bagian Umum	√		
	Surat Keputusan Nomor : 54.1/Kpts/OT.050/J.3.1/06/2016 Pembentukan Tim/Kelompok Kepedulian Keamanan, Kebersihan, dan Kenyamanan (K3) PPMKP Ciawi Tahun 2016	13 Juni 2016	Bagian Umum	√		

	Surat Keputusan Nomor : 55/KPA/KU.010/J.3.1/06/2016 Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PPMKP Ciawi	14 Juni 2016	Bagian Umum	√			
	Surat Keputusan Nomor : 56/Kpts/KP.370/J.3.1/06/2016 Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis	17 Juni 2016	Bagian Umum	√			
	Surat Keputusan Nomor : 57/Kpts/KP.320/J.3.1/06/2016 Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern PPMKP	20 Juni 2016	Bagian Umum	√			